

WORKSHEET: Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 3 Nomor. 2, Mei 2024

ANALISIS PENERAPAN *SUSTAINABLE FINANCE* PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS BPR DI KABUPATEN DELI SERDANG)

Tifani Ananda^{1*)} Lukman Hakim Siregar²⁾ Listya Devi Junaidi³⁾

1)- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
tifaniananda973@gmail.com

2)- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
lukman.fe@dharmawangsa.ac.id

3)- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa
listyadevi@dharmawangsa.ac.id

*Corresponding email: tifaniananda973@gmail.com

Abstract

Lembaga keuangan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), telah berkonsentrasi pada penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam era keuangan yang terus berkembang. Dengan menggunakan studi kasus sebagai metode utama, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan keuangan berkelanjutan pada BPR di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian kualitatif menggunakan data dari wawancara mendalam dengan manajemen PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan PT BPR Solider. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33 lebih memahami tentang keuangan hijau dan lebih siap untuk menerapkan dan meningkatkan kegiatan keuangan hijau di fasilitasnya. Untuk dapat menjalankan Sustainable Finance pada BPR yang dikelola, BPR Solider masih membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan tata laksana Sustainable Finance. Kedua BPR memiliki pengalaman yang sama dalam menerapkan Sustainable Finance pada sektor pendanaan atau pembiayaan UMKM. Beberapa kendala umum yang dihadapi oleh BPR termasuk risiko yang tinggi bagi penerap dan kurangnya sosialisasi dari OJK. Dalam kegiatan Sustainable Finance BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan BPR Solider baru, empat aspek implementasi awal dilakukan, yaitu penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan, pengelolaan lingkungan internal yang ramah lingkungan, desain, dan pengembangan softskill bagi para pelaku kegiatan Lembaga Jasa Keuangan. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana BPR di wilayah ini menerapkan konsep keuangan berkelanjutan. Hasilnya diharapkan dapat membantu dalam pengembangan kebijakan dan praktik keuangan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro seperti BPR.

Keyword: Sustainable Finance , Bank Perkreditan Rakyat, BPR Nusantara Bona Pasogit 33, BPR Solider

PENDAHULUAN

Pada saat ini, setiap perusahaan menghadapi masalah yang semakin kompleks. Satu di antaranya adalah masalah lingkungan, yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih besar karena tindakan perusahaan telah menyebabkan pemanasan global, terutama perusahaan di bidang industri. Ini berbeda dengan tujuan pembangunan, yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatif seperti kesenjangan sosial dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharuskan untuk bertindak adil, tidak hanya

mengejar keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan masalah lingkungan yang semakin memprihatinkan. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan yang berfokus pada penanggulangan emisi gas rumah kaca. Salah satu contohnya adalah partisipasi Indonesia dalam Summit Pittsburgh pada tahun 2009. Pada kesempatan itu, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari berbagai aktifitas kehidupan sebanyak 26% dan berharap seluruh dunia berkomitmen untuk menurunkan setidaknya 41% dampak pemanasan global. Dalam upaya menurunkan 26% emisi gas rumah kaca, berbagai sektor berkontribusi, termasuk kehutanan (50% dari lahan gambut), energi dan transportasi (3,8%), pertanian (18%), pengelolaan limbah (5,9%), dan industri (1,8%). Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca (RAN GRK) mencakup tindakan yang disebutkan di atas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, RAN GRK juga memasukkan rangka kerja pembangunan berkelanjutan dalam empat dimensi: sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan.

Pandangan lingkungan harus mencakup berbagai bidang. Sebagai salah satu sektor keuangan, bank harus terlibat dalam masalah lingkungan dan perbaikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bank lebih distigmatisasi karena hanya berfokus pada keuntungan finansial dan hal-hal lain yang berfokus pada uang sambil mengabaikan masalah lingkungan. Kita menyadari bahwa kegiatan usaha yang ramah lingkungan membutuhkan banyak uang. Oleh karena itu, bank telah menjadi salah satu organisasi yang memainkan peran penting dalam pengalokasian dana untuk mendukung inisiatif yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bank dapat menawarkan berbagai program untuk mendukung program pemerintah, seperti program pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Program ini termasuk pembangkit listrik tenaga surya, angin, bahan organik, dan biogas. Pada tanggal 5 Desember 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat "Roadmap for Sustainable Finance", yang mencakup strategi untuk program keuangan berkelanjutan. Roadmap tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kesenjangan sosial dan dampak lingkungannya. Sektor keuangan berkelanjutan adalah contoh nyata dari dukungan industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari penyesuaian terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan menunjuk setidaknya delapan bank untuk mensukseskan program ini, diharapkan bahwa bank-bank ini akan berfungsi sebagai role model dalam mendukung program berkelanjutan. Dalam upaya untuk mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih hijau, penggunaan keuangan berkelanjutan dalam operasional bank akan berhasil, meskipun ada banyak hambatan yang

menghalanginya. Ini terjadi karena tidak adanya pedoman teknis untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, meskipun peraturan untuk menerapkannya sudah dibuat. Karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang penerapan keuangan yang berkelanjutan yang berfokus pada sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian ini diberi judul "Analisis Penerapan Keuangan Berkelanjutan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus BPR Di Kabupaten Deli Serang)". BPR yang menjadi fokus penelitian ini adalah BPR di Kabupaten Deli Serang.

METODE PENELITIAN

Menurut definisi dari (Prastowo, 2014: hal 47), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa, kegiatan, benda, dan individu dalam kehidupan nyata dalam jangka waktu yang masih tersimpan dalam ingatan responden atau saat ini. Penelitian ini akan memberikan gambaran umum tentang BPR terhadap kegiatan Keuangan Berkelanjutan, tindakan yang telah dilakukan oleh BPR dan tindakan yang akan dilakukan oleh BPR. Ini juga akan menjelaskan seberapa siap BPR untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 3.2.2. Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari penerapan keuangan berkelanjutan pada dua BPR di Kabupaten Deli Serdang, PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan PT BPR Solider. Kedua BPR ini dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki perbedaan dalam kepemilikan, investasi, dan jumlah saham. PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33 adalah anak perusahaan dari PT BPR Nusantara Bona Pasogit (PT. NBP), dan PT BPR Solider adalah anak perusahaan. Data Primer, Data ini berasal dari wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya (Nazir, 2014; hal 102). Data Sekunde, dokumentasi pendukung (Sandu, 2015; hal 211) adalah laporan keuangan tahunan dari masing-masing BPR, yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 52/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Direksi dari masing-masing BPR akan menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data diantaranya Observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang mencakup pengamatan untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana BPR menerapkan pengelolaan keuangan hijau; tanggapan BPR terhadap penerapan ini; hambatan yang dihadapi; regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan hijau; dan analisis dokumen, termasuk Laporan Keuangan Tahunan masing-masing BPR. Metode Analisis Data: Analisis data digunakan untuk

membahas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil observasi diuraikan untuk memberikan gambaran umum tentang penerapan Sustainable Finance. Hasil wawancara diuraikan untuk mengaitkan penerapan Sustainable Finance dengan BPR yang telah dilakukan atau yang belum dilakukan, dengan mengacu pada tabel tahap-tahap penerapan Sustainable Finance. Menganalisis hasil wawancara: Hasil wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tindakan Sustainable Finance yang telah dilakukan oleh BPR. Beberapa substansi yang akan digali berupa: a) Pemahaman, pandangan, dan ketertarikan BPR terhadap penerapan Sustainable Finance b) Kapasitas BPR untuk menerapkan Sustainable Finance c) Kendala dalam menerapkan Sustainable Finance.

HASIL DAN PEMBAHAS

1. Hasil Penelitian

Sejarah PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33: PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33 mulai beroperasi pada 15 Juli 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-399/KM.17/1997, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Selama operasinya, PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33 telah mengalami beberapa perubahan, salah satunya adalah Akta Nomor 2 yang dikeluarkan pada 1 Maret 2022. PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33 adalah salah satu anak perusahaan PT BPR Nusantara Bona Pasogit (PT. NBP). PT NBP adalah pemegang saham pengendali atas 28 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, dan Riau, dengan 115 kantor, termasuk 28 Kantor Pusat, 24 Kantor Cabang, dan 58 Kantor Kas. Lima Pemegang Saham menyetorkan total Rp 1.250.000.000 ke PT BPR Nusantara Bona Pasogit dari tanggal 33 hingga 31 Desember 2021.

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh BPR. Pertanyaan yang diajukan dibagi menjadi dua topik, yaitu gambaran umum tentang bagaimana BPR menerapkan Keuangan Berkelanjutan berdasarkan tahap persiapan dan pelaksanaan awalnya. Hasil wawancara menunjukkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masing-masing BPR terkait penerapan Sustainable Finance: a) Pemahaman, perspektif, dan ketertarikan BPR terhadap penerapan Sustainable Finance, seperti yang ditunjukkan oleh jawaban atas pertanyaan berikut:

Pertanyaan 1: Apakah bapak/ibu sebagai direksi BPR sudah mengetahui tentang Sustainable Finance yang saat ini diterapkan di Indonesia?

"Sudah, saya sudah paham tentang Sustainable Finance yang diterapkan di Indonesia," jawab Bapak Jon Riston Saragih, Direktur PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33. "Sudah, kami paham apa itu keuangan berkelanjutan," kata Bapak Anastanius B. Saragih, Direktur Operasional/Kepatuhan PT BPR Solider.

Pertanyaan 2: Apakah bapak/ibu percaya bahwa keuangan berkelanjutan dapat menjadi bisnis yang menguntungkan?

Bapak Jon Riston Saragih, Direktur PT BPR Nusantara Bona Pasogit nomor 33, memberikan jawaban berikut: Kami percaya konsep keuangan berkelanjutan sangat praktis. Bapak Anastanius B. Saragih, Direktur Operasional/Kepatuhan PT BPR Solider, menjawab, "Kalau diterapkan dengan benar, saya pikir ini bisa mendatangkan keuntungan dan pasti jadi area bisnis yang menguntungkan."

Pertanyaan 3: Apakah bapak/ibu berencana untuk meningkatkan aktivitas keuangan berkelanjutan di BPR yang bapak/ibu kelola?

Bapak Jon Riston Saragih, Direktur PT BPR Nusantara Bona Pasogit nomor 33, memberikan jawaban berikut: "Untuk meningkatkannya kami memang jadikan prioritas di BPR kami", jawab Bpk Anastanius B. Saragih, Direktur Operasional/Kepatuhan PT BPR Solider, "ya, kami akan meningkatkan aktivitas keuangan berkelanjutan itu sedikit demi sedikit." b) Jawaban berikut menunjukkan kapasitas BPR untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan:

Pertanyaan 4: Apakah BPR yang dikelola oleh bapak/ibu memiliki pengalaman dalam memberikan kredit untuk proyek lingkungan seperti pendanaan agrikultur, pengolahan energi terbarukan, dll.? Dan

Pertanyaan 5: Tolong sebutkan sektor apa saja yang banyak mendapatkan dana dari BPR ini?

Jawaban dari Bapak Jon Riston Saragih, Direktur PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33) adalah "pernah beberapa kali", dan jawaban dari Bapak Anastanius B. Saragih, Direktur Operasional/Kepatuhan PT BPR Solider adalah "pernah". Bapak Jon Riston Saragih, Direktur PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33) menjawab, "Paling banyak itu sektor Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM dan sektor pertanian". Bapak

Anastanius B. Saragih, Direktur Operasional/Kepatuhan PT BPR Solider, menjawab, "UMKM dan pertania".

Berdasarkan jawaban yang diberikan di bawah ini, kendala-kendala yang dihadapi oleh BPR dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan disimpulkan. Pertanyaan 6: Menurut bapak/ibu, apa yang membuat Sustainable Fiannce masih sulit diterapkan di BPR yang bapak/ibu awasi?

Bapak Jon Riston Saragih, Direktur PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33) menjawab, "pertama, tidak seluruh pegawai atau karyawan paham tentang itu, kedua kurangnya permintaan untuk kegiatan itu, ketiga risikonya agak besar". Bapak Anastanius B. Saragih, Direktur Operasional/Kepatuhan PT BPR Solider, menjawab, "pertama, tidak semua mengerti tentang sistem itu, kedua kurangnya sosialisasi tentang keuangan berkeanjutan itu baik dari pemerintah d) Jawaban berikut menyimpulkan pendapat BPR tentang peraturan atau peraturan yang berkaitan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan:

Pertanyaan 7: Menurut bapak dan ibu, apakah undang-undang berkelanjutan telah membantu pertumbuhan investasi berkelanjutan? Dan Pertanyaan 8: Apa dukungan dari otoritas perbankan yang diperlukan untuk membantu BPR bapak/ibu dalam menerapkan Sustainable Finance?

Jawaban dari Bapak Jon Riston Saragih (Direktur PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33) adalah "sejauh ini kami kira sudah cukup membantu". Jawaban dari Bapak Anastanius B. Saragih(Direktur Operasional/Kepatuhan PT BPR Solider) adalah "sedikit membantu". Bapak Jon Riston Saragih, Direktur PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33, menjawab, "adanya pembangunan kapasitas". Bapak Anastanius B. Saragih, Direktur Operasional/Kepatuhan PT BPR Solider, menjawab, "berikan sosialiasi yang intensif pada kami selaku BPR dan terus lakukan pendampingan pada kami.

2. Pembahasan Penelitian

Peneliti dapat menjelaskan beberapa poin berikut berdasarkan jawaban dari wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran umum penerapan Sustainable oleh masing-masing BPR tersebut. a) Pemahaman, perspektif, dan keinginan BPR untuk menerapkan keuangan berkelanjutan: Menurut jawaban informan atas pertanyaan tentang pemahaman, perspektif, dan keinginan BPR untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, PT BPT Nusantara Bona Pasogit 33

telah memahami konsep keuangan berkelanjutan, begitu pula PT BPR Solider. Mereka mungkin sudah terbiasa dengan istilah Sustainable Finance karena sering mendengarnya. Sebagai tanggapan atas pertanyaan tersebut, BPR Nusantara Bona Pasogit 33 melihat Sustainable Finance sebagai bisnis yang menjanjikan yang dapat menghasilkan keuntungan, dan mereka yakin akan menghasilkan keuntungan besar asalkan diterapkan dengan benar dan dipantau secara terus menerus. Sementara itu, BPR Solider masih ragu dengan konsep Sustainable Finance karena dianggap terlalu sulit untuk diterapkan. Hasil wawancara dengan kedua BPR ini menunjukkan bahwa mereka berkonsentrasi pada pendanaan UMKM dengan menyediakan kredit mulai dari Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 350.000.000,- untuk BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 200.000.000,- untuk BPR Solider.

Selanjutnya, sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang rencana untuk meningkatkan aktivitas keuangan berkelanjutan di BPR yang dikelola, BPR Nusantara Bona Pasogit 33 akan melakukan peningkatan. Ini lebih karena PT NBP adalah bagian dari NBP Grup, yang memiliki 28 Bank Perkreditan Rakyat di seluruh pulau Sumatera dan Jabodetabek. Namun, karena merupakan BPR tunggal dengan jumlah saham yang terbatas, BPR Solider hanya akan meningkatkan aktivitas keuangan berkelanjutan secara bertahap. Karena sektor agrikultur sangat bergantung pada kondisi alam, sulit bagi BPR untuk memfokuskan operasi keuangan berkelanjutan pada sektor ini. Sebaliknya, mereka lebih memilih sektor UMKM dengan tingkat risiko yang lebih rendah.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kedua BPR tersebut, PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan BPR Solider, masing-masing telah memberikan pendanaan untuk kegiatan keuangan hijau dengan memberikan kredit kepada usaha masyarakat UMKM dan sektor pertanian. PT BPR Solider juga telah memberikan pendanaan untuk kegiatan keuangan hijau dengan memberikan kredit kepada usaha masyarakat UMKM dan sektor pertanian. Ini adalah hasil dari visi misi kedua BPR, yang berpusat pada usaha kecil masyarakat seperti UMKM, pertanian, dan pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha. Sebab sektor pertanian dan UMKM dianggap memiliki risiko yang tinggi karena bergantung pada keadaan alam, sehingga pendapatan petani sulit diprediksi, sehingga mengganggu pembayaran kredit, yang pada gilirannya akan menyebabkan kredit macet bank, kedua BPR tersebut memilih pendanaan keuangan berkelanjutan untuk sektor pertanian dan UMKM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua BPR ini belum lama berpartisipasi dalam program keuangan berkelanjutan di sektor kecil menengah. belum pengalaman dalam proyek skala besar. Jumlah saham BPR yang masih terbatas juga memengaruhi hal ini.

Hambatan yang dihadapi oleh BPR dalam menerapkan Sustainable Finance: Menurut hasil wawancara pada pertanyaan 6 di atas, BPR Nusantara Bona Pasogit 33 menyatakan bahwa setidaknya

ada tiga hal yang menjadi hambatan untuk menerapkan Sustainable Finance. Yang pertama adalah fakta bahwa tidak semua staf atau karyawan memahami konsep tersebut. Yang kedua adalah kurangnya permintaan untuk aktivitas tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis kecil dan menengah (UMKM) biasanya telah memiliki Kredit Usaha Rakyat dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Terakhir ketiga adalah risiko ketidakpastian yang agak besar tentang pembayaran atau pengembalian kredit, yang dapat memengaruhi kredit bank yang macet. Hal ini akan berdampak pada profitabilitas bank, yang merupakan bahaya bagi setiap bank. Sebaliknya, BPR Solider menyatakan dua alasan utama yang menghalangi pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Pertama, tidak semua orang memahami sistem keuangan berkelanjutan, dan banyak karyawan BPR Solider kurang memahami konsep dan tata laksana keuangan berkelanjutan. Faktor kedua adalah kurangnya pendidikan tentang keuangan berkelanjutan dari pemerintah maupun OJK.

Berdasarkan jawaban direksi BPR di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam promosi keuangan berkelanjutan, pemerintah dan OJK secara bersamaan d) Pendapat BPR tentang regulasi atau aturan mengenai penerapan Sustainable Finance: Menurut Direktur BPR Nusantara Bona Pasugit, berdasarkan jawaban pertanyaan mengenai pandangan BPR tentang regulasi atau aturan mengenai penerapan Sustainable Finance, kerangka regulasi pengembangan investasi berkelanjutan sudah cukup membantu. Pendapat direktur tentang kebijakan penerapan Sustainable Finance juga diperkuat. Namun, direktur BPR Solider menjawab dengan cara yang berbeda. Dia menjawab pertanyaan yang sama dengan mengatakan bahwa regulasi saat ini baru sedikit membantu. Menurutnya, regulator belum aktif menyebarkan aturan yang ada, terutama oleh OJK. Dalam hal dukungan dari otoritas perbankan untuk membantu BPR menerapkan Sustainable Finance, direktur BPR Nusantara Bona Pasugit 33 menyatakan bahwa pembangunan kapasitas dapat berupa pelatihan, penyebaran pengetahuan melalui seminar, dan webinar. Dengan cara yang sama, direktur BPR Solider menyatakan bahwa sosialisasi BPR yang intensif diperlukan dan pendampingan terus menerus dalam menerapkan Sustainable Finance, terutama bagi LJK yang belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menerapkan Sustainable Finance. Diharapkan sosialisasi ini dikombinasikan dengan pemberian pemahaman mendalam serta pembinaan softskill bagi para pekerja Lembaga Jasa Keuangan.

Tahap Persiapan Ini adalah tahap di mana bank melakukan persiapan internal untuk melaksanakan kegiatan Keuangan Berkelanjutan. Tabel berikut menunjukkan tahap persiapan kedua BPR dalam melaksanakan kegiatan Keuangan Berkelanjutan.

No	Pertanyaan	PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33			PT BPR Solider		
		Sudah	Belum	Rencana Pelaksanaan (Jika Belum)	Sudah	Belum	Rencana Pelaksanaan (Jika Belum)
1	Melakukan penyesuaian Visi Misi, tata kelola, Standar Prosedur dan operasional serta Program yang mendukung <i>Sustainable Finance</i>						
	a) Visi Misi		✓	2024		✓	
	b) Tata Kelola		✓	2024		✓	
	c) Standar Prosedur Operasional (SOP)		✓	2024		✓	
	d) Program yang mendukung <i>Sustainable Finance</i>	✓				✓	
2	Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)		✓			✓	
3	Pengembangan Kapasitas Internal		✓			✓	

Berdasarkan hasil wawancara yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa BPR Nusantara Bona Pasogit 33 masih dalam tahap persiapan untuk menyesuaikan visi misi, tata kelola, prosedur operasi standar (SOP), dan program yang mendukung Sustainable Finance. Visi misi, tata kelola, SOP, dan program yang mendukung Sustainable Finance belum diperbarui. Mereka baru-baru ini direncanakan untuk menyesuaikannya dengan regulasi penerapan Sustainable Finance. Hal yang sama terjadi pada BPR Solider. Mereka masih belum melakukan penyesuaian pada visi, misi, tata kelola, dan Standar Operasional Prosedur.

Karena itu, untuk melakukan penyesuaian ini, para pemangku kepentingan harus berkumpul secara menyeluruh untuk memahami satu sama lain dan mencapai tujuan yang sama. Karena kurangnya karyawan yang memahami secara menyeluruh tentang Sustainable Finance, BPR Solider belum melakukan apa pun untuk mendukung program Sustainable Finance. Dalam hal penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB), seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, BPR Nusantara Bona Pasogit 33 belum menyusun RAKB.

Hal yang sama berlaku untuk BOR Solider, yang juga belum menyusun RAKB untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan kapasitas internal adalah bagian terakhir dari fase ini. Tabel menunjukkan bahwa BPR Solider dan BPR Nusantara Bona Pasogit 33 belum melakukan pengembangan kapasitas internal di BPR mereka masing-masing. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan sebagai tindak lanjut dari OJK dalam mendukung pelaksanaan kebijakan keuangan hijau bagi BPR.

Namun, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPR Nusantara Bona Pasogit 33 belum melakukan penyesuaian visi misi, tata kelola, dan SOP terkait kebijakan penerapan keuangan hijau. Namun, BPR ini telah memiliki program yang mendukung kebijakan hijau saat menyusun RAKB. Pada langkah ini, kita akan melihat bagaimana BPR memulai membangun sistem keuangan yang berkelanjutan untuk perusahaannya. Ini dimulai pada tahun pertama periode yang telah ditetapkan dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan dan kompleksitas BPR. Penerapan yang telah dilakukan oleh masing-masing BPR dan yang akan dilakukan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2

Tahap Implementasi Awal Kegiatan Sustainable Finance

No	Pertanyaan	PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33			PT BPR Solider		
		Sudah	Belum	Rencana Pelaksanaan (Jika Belum)	Sudah	Belum	Rencana Pelaksanaan (Jika Belum)
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)		✓			✓	
2	Penyesuaian SPO pada divisi yang sudah ada atau divisi khusus terkait <i>Sustainable Finance</i>		✓			✓	
3	Penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan	✓			✓		
4	Pengelolaan lingkungan internal yang ramah lingkungan hidup	✓			✓		
5	Penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha bank dengan kriteria daka kategori kegiatan usaha berkelanjutan		✓			✓	
6	Desain, Pengembangan dan Inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan	✓			✓		

7	Inisiasi Portofolio		✓			✓	
8	Edukasi eksternal	✓			✓		

Tabel di atas menunjukkan bahwa banyak hal dapat ditampilkan di bawah ini. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahap pengembangan SD, yang merupakan bagian dari tahap implementasi awal penerapan Sustainable Finance, BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan BPR Solider belum melakukan pengembangan kapasitas internal berupa pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini karena Lemabga Jasa Keuangan belum melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengembangkan SDM. Selanjutnya, terkait dengan aspek penyesuaian SPO pada devisi yang sudah ada, kedua BPR di atas belum melakukan penyesuaian atas Standar Prosedur Operasional pada devisi yang sudah ada. Selain itu, menurut informasi yang diperoleh dari wawancara, kedua BPR ini tidak memiliki devisi khusus tentang Keuangan Berkelanjutan. Sebaliknya, mereka memiliki unit yang berfokus pada pengembangan keuangan berkelanjutan. Jika elemen penyesuaian Standar Prosedur Operasional belum dilakukan pada tahapan implementasi awal ini, maka penyesuaian Standar Prosedur Operasional pada devisi yang saat ini juga mungkin belum dilakukan. Selain itu, sistem teknologi BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan BPR Solider telah disesuaikan dengan teknologi informasi dan pelaporan. Kedua BPR tersebut memiliki website resmi yang menawarkan layanan informasi kepada siapa saja yang mengaksesnya. Website resmi BPR Solider dan BPR Nusantara Bona Pasogit dapat ditemukan di <https://bprsolider.com/> dan <https://bprnbp33>.

Kedua BPR tersebut memiliki publikasi yang dapat diunduh oleh siapa saja yang membutuhkannya. BPR Nusantara Bona Pasogit 33 menggunakan aplikasi SysBom NBP 33 untuk berkomunikasi dengan member area. Untuk memaksimalkan pelayanan BPR kepada masyarakat, BPR Solider telah menggunakan aplikasi online untuk mengajukan kredit. Dalam hal pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan, kedua BPR, BPR Nusantara Bona Pasugit 33 dan BPR Solider, telah menerapkan peralatan kantor yang mengadopsi konsep ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lampu yang hemat energi, penggunaan kertas yang efisien, dan pengurangan limbah plastik dari konsumsi karyawan, dengan menekankan agar pegaai menggunakan alat makan mereka di bawah di rumah. Selain itu, ada bukti bahwa penggunaan alat pendingin ruangan (AC) yang hemat energi adalah cara untuk memaksimalkan jumlah energi listrik yang digunakan. Seterusnya, kedua BPR di atas (BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan BPR Solider) gagal mengkategorikan kegiatan usaha mereka sesuai dengan sektor usaha yang mereka danai. Meskipun demikian, berdasarkan

temuan wawancara, kedua BPR telah melakukan klasifikasi untuk sektor UMKM dan non-UMKM. Pemisahan ini dilakukan karena sektor non-UMKM yang dinilai memiliki risiko yang lebih besar daripada sektor UMKM itu sendiri.

Selanjutnya, baik BPR Nusantara Bona Pasogit 33 maupun BPR Solider telah mengembangkan dan mengembangkan produk dan jasa keuangan yang berkelanjutan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, BPR Nusantara Bona Pasogit 33 telah menggunakan aplikasi SysBom NBP 33 untuk membuat masyarakat dan nasabah lebih mudah mendapatkan kredit. Dengan cara yang sama, BPR Solider telah memanfaatkan fitur aplikasi online yang tersedia di situs web resmi mereka untuk membantu klien mereka mengajukan kredit dan memperluas jaringan nasabah mereka. Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan kertas adalah dengan menggunakan teknologi ini. Ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung program paperless, yang baru-baru ini diluncurkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produksi kertas. Aspek inisiasi portofolio berikutnya menunjukkan bahwa kedua BPR di atas belum membuat portofolio kegiatan keuangan berkelanjutan. Namun, mereka secara tidak langsung mendukung keuangan berkelanjutan, seperti yang ditunjukkan oleh pemberian kredit kepada usaha Masyarakat Kecil Menengah atau UMKM. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, kedua BPR (BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan BPR Solider) telah menerima pelatihan eksternal. Dijelaskan bahwa BPR Nusantara Bona Pasogit 33 telah memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM tentang teknik manajemen keuangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan mempertimbangkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dua BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan BPR Solider baru melakukan empat langkah dalam implementasi awal. Ini adalah perubahan sistem teknologi informasi dan pelaporan, pengelolaan lingkungan internal yang ramah lingkungan, desain, pengembangan, dan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, dan pelatihan eksternal.

Hasil wawancara dengan direktur BPR Nusantara Bona Pasogit 33 dan direktur BPR Solider adalah sebagai berikut: a) Direktur BPR Nusantara Bona Pasogit 33 mengatakan bahwa penerapan Sustainable Finance memerlukan persamaan persepsi dan sigergisitas terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dia juga mengatakan bahwa penerapan ini harus dilakukan terlepas dari peran otoritas dalam memberikan pembinaan kepada para BPR agar pelaksanaan kegiatan Sustainable Finance dapat. b) Direktur BPR Solider mengatakan bahwa penerapan Sustainable Finance di skala BPR membutuhkan kesiapan yang matang dari pengelola BPR karena tidak semua pengelola dan staf memahami konsep Sustainable Finance secara menyeluruh. Para pengelola BPR harus berusaha mendapatkan dukungan regulator untuk mendapatkan sosialisasi dan pembekalan yang komprehensif tentang cara menerapkan Sustainable Finance di skala BPR. Setelah melakukan evaluasi tentang

penerapan prinsip keuangan berkelanjutan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dapat disimpulkan bahwa ada banyak peluang dan tantangan yang terkait dengan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Studi ini menunjukkan bahwa BPR memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui praktik keuangan dan kebijakan yang bertanggung jawab. Implementasi keuangan berkelanjutan dalam BPR memiliki dampak positif secara ekonomi dan sosial selain lingkungan.

BPR yang menerapkan keuangan ramah lingkungan memiliki dampak positif terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka. Selain itu, keterlibatan aktif dalam pembiayaan proyek yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hubungan dengan konsumen dan masyarakat. Meskipun demikian, masalah seperti penilaian risiko yang kompleks dan kebutuhan modal yang lebih tinggi perlu diatasi untuk memastikan bahwa Sistem Keuangan Berkelanjutan ini diterapkan secara berkelanjutan. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa BPR dan masyarakat harus lebih menyadari dan belajar tentang keuangan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa penerapan Sustainable Finance pada BPR akan memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Ini karena pengembangan Sustainable Finance pada BPR memerlukan kerja sama antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat.

KESIMPULAN

BPR Nusantara Bona Pasogit 33 telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keuangan berkelanjutan dan dinilai lebih siap untuk menerapkan dan meningkatkan kegiatan keuangan berkelanjutan berdasarkan fasilitas yang mereka miliki. Di sisi lain, BPR Solider perlu meningkatkan pemahamannya tentang konsep-konsep keuangan berkelanjutan sehingga mereka dapat menerapkannya pada BPR yang dikelola. Kedua BPR dinilai sama dari segi pengalaman dalam menerapkan keuangan hijau di sektor pendanaan atau pembiayaan UMKM. Beberapa kendala umum yang dihadapi oleh BPR termasuk pemahaman yang buruk tentang konsep dan tata laksana keuangan hijau, kurangnya sosialisasi dari OJK, dan risiko yang tinggi saat menerapkannya. Perlu ada pelatihan, pengetahuan melalui seminar, workshop, dan diskusi sosialisasi yang intensif, serta pengembangan softskill bagi karyawan Lembaga Jasa Keuangan dalam program Keuangan Berkelanjutan. Empat komponen yang diperlukan untuk implementasi awal dilakukan oleh BPR Nusantar Bona Pasogit 33 dan BPR Solider baru: penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan; pengelolaan

lingkungan internal yang ramah lingkungan; desain; pengembangan dan inovasi produk dan jasa keuangan berkelanjutan; dan pelatihan eksternal.

REFERENSI

- Ani, S. M., & Fedy, H. (2017). Mekanisme Governance dan Pengungkapan *Sustainable Finance*: Untuk Melihat Tingkat Kesiapan Penerapan *Sustainable Finance* pada Perusahaan Jasa Keuangan Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*. Vol 21 No 3,3.
- Brigham, Eugene F. dan Houston, J. F. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan 1* (e14). Penerbit Salemba Empat.
- Clark, G., Feiner, A., & Viehs, M. (2017). From the stockholder to the stakeholder: How sustainability can drive financial outperformance. University of Oxford, Smith School of Enterprise and the Environment.
- Darminto, D. P., & Suryo, A. (2005). Analisis laporan keuangan hotel. Andi Offset
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2011). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11).
- Harahap, S. S. (2009). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Rajawali Pers.
- Hery. (2015). Analisis Laporan Keuangan, Pendekatan Rasio Keuangan. Cet. ke1. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Hoepner, A. G., Oikonomou, I., & Scholtens, B. (2019). The effects of corporate and country sustainability characteristics on the cost of debt: An international investigation. *The European Journal of Finance*, 25(18).
- Huang, Yongming ., Chen Chen, Lijun Lei, Yaping Zhang. (2022). Impacts of green finance on green innovation: A spatial and nonlinear perspective. *Journal of Cleaner Production*, Volume 365. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132548>.
- Japhet, Olusadum Nnaeto., Ndoh Juliet Anulika (2018). "Impact of Motivation on Employee Performance: A Study of Alvan Ikoku Federal College of Education:., *Journal of Management and Strategy*, December Vol. 9. No.1
- Jumingan. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Bumi Aksara.
- K.R. Subramanyam, J. J. W. (2015). Financial Statement Analysis. McGraw-Hill.
- Kamaruddin, A. (2017). Akuntansi manajemen: dasar-dasar konsep biaya dan pengambilan keputusan. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munawir. (2014). Analisa laporan keuangan Edisi Keempat Cet.3. Liberty.
- Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- OJK. (2014). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019*. Retrieved from OJK *Sustainable Finance*: <https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/publikasi/panduan/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan.aspx>
- OJK. (2017). Forum Koordinasi Keuangan Berkelanjutan (FKKB). (p.6). Jakarta: OJK
- Oktavianingsih, Anik (2016) *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Financial Sustainability Ratio Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa*. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan
- POJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan perusahaan Publik

- Pusvita, Ike Devi. (2017). Analisis Penerapan Green Banking Dalam Efisiensi Biaya Operasional Pada Industri Perbankan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Skripsi. <http://eprints.perbanas.ac.id/6081/3/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>
- Simamora, Saur Contanius. (2019). Implementasi Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) Di Pt. Bank Negara Indonesia, Tbk Tahun 2015 – 2017. Jurnal Ilmiah M-Progress. Vol 9, No. 1. 32-49. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v9i1.267>
- Tafsir, M. (2021). *Sustainable Finance: A Strategy to Increase Good Corporate Governance and Company Value in Banking Industry*. Atestasi : *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 164–172. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.99>
- Utami, Y., & Anastasia, Elza, A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Jasa Sektor Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 - 2015, VIII(1).